



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



RENJA

Rencana Kerja
Tahun 2023

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perbuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2023.

Ucapan terimakasih bagi semua pihak atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, dengan harapan semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta atas kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tembilahan, Agustus 2022
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. SIRAJUDDIN, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660609 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	24
2.4. Review terhadap awal RKPD	31
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	45
3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan	45
3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	52
BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir	16
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	22
Tabel 2.3. Review Terhadap awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir	33
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir	41
Tabel 3.1. Keselarasan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Dengan APBN	43
Tabel 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	44
Tabel 3.3. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	46
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah- langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Secara hirarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Di sisi lain, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir

Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dijabarkan bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan Nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat pemersatu bangsa.

Sebagaimana dapat dilihat pembangunan perkebunan terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah. Data empiris menunjukkan munculnya pusat-pusat perekonomian baru. Namun demikian pembangunan perkebunan kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, antara lain : makin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terbatasnya ketersediaan benih tanaman perkebunan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kelembagaan petani, tekanan globalisasi dan liberasi pasar dan lain-lain.

Sejalan dengan semangat reformasi perencanaan dan penganggaran dasar serta otonomi daerah, Dinas Perkebunan dituntut untuk mengubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan perkebunan. Program dan kegiatan pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta maupun *stake holders* lainnya. Berdasarkan kerangka pikir di atas Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2022 menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat (RENJA) Dinas Perkebunan merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perkebunan. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan sehingga tujuan pembangunan perkebunan dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai.

Renja Perangkat Daerah menggambarkan target-target pencapaian berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan menginventarisir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Salah satu cara yang diambil untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam Rapat Koordinasi (Rakor), yang melibatkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Disamping menyerap aspirasi dari pendekatan yang diuraikan diatas, juga dengan memperhatikan tuntutan yang muncul pada masyarakat seiring dengan kemajuan dan teknologi informasi dewasa ini.

Hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Provinsi sehingga terlihat benang merah pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD dengan langkahlangkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan

yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemudian disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai agenda tahunan PD. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).
 17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Tahun 2023. Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah;

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2023 bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir .
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Awal PD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses penilaian terhadap : (1) aspek pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, (2) aspek pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan (3) aspek hasil rencana pembangunan daerah. Adapun tolak ukur dari suatu proses evaluasi adalah capaian kinerja. Arti 'kinerja' itu sendiri adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran berdasarkan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang telah ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang telah disepakati. Sebagaimana tahapan proses pelaksanaan pembangunan pada umumnya, maka dalam proses pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan pun memiliki siklus yang sama, yaitu meliputi : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian dan tahap evaluasi. Adapun terkait dengan tahap evaluasi hasil perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan periode yang lalu, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan selama Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat

(*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

c. Evaluasi Program Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 24,724,727,495,-. Dana tersebut kesemuanya berasal dari APBD II Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Program dan kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan di karenakan adanya Rasionalisasi Anggaran
- 2) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Kegiatan Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian yaitu Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertaniain sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi tidak dapat dilaksanakan karena Rasionalisasi Anggaran. Selanjutnya pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota Sub Kegiatan Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman dan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran
- 3) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya, yaitu pengadaan mesin pembelah pinang kelompok tani makmur sejahtera kelurahan Sungai Perak dan Kelompok Tani Sinar Pelita Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan pembangunan lantai jemur kelapa dan pinang di Desa Sanglar Reteh belum bisa dilaksanakan karena nama kelompok tani sudah dan akan dilaksanakan pada anggaran perubahan

- 4) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani yaitu pembangunan tanggul mekanik terjadi pengurangan target kinerja dari 28 Unit menjadi 20 Unit dikarenakan Rasionalisasi Anggaran.
- 5) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pada Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tidak dilaksanakan karena telah adanya Rasionalisasi Anggaran. Selanjutnya pada Sub Kegiatan Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan terjadi pengurangan target dari 3 kegiatan menjadi 1 kegiatan karena Rasionalisasi Anggaran.
- 6) Program Penyuluhan Pertanian pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan karena Rasionalisasi Anggaran.

d. Evaluasi Program Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 23,732,211,878,-. Dana

tersebut kesemuanya berasal dari APBD II Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa permasalahan pencapaiannya kinerja Program dan kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan :

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Pertemuan statistik perkebunan belum bisa dilaksanakan di karenakan anggaran sewa gedung pertemuan belum di anggarkan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Sedang membuat laporan kinerja instansi/SKPD namun kegiatan dalam proses pengerjaan
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Kegiatan sedang berlangsung monitoring dan evaluasi sedang dalam proses dilaksanakan

b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Kegiatan harus menyesuaikan dengan Anggaran Kas yang dibuat, sehingga realisasi harus mengikuti jadwal yang telah disusun

c. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Adanya kegiatan yang harus dilakukan pergeseran, apabila tidak dilakukan maka realisasi tidak bisa tercapai
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Pengadaan untuk komputer dan lain - lain belum dapat dilaksanakan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan : Tidak ada bukti fisik koran, Isi berita tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

d. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- SuB Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Pemindahan meteran listrik dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : Servis dan ganti suku cadang komputer, mesin fotocopy dan lain - lain belum ada di gunakan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : Kegiatan dalam tahap persiapan pencairan dana Fisik dan pengawasan

f. Kegiatan Penataan organisasi

- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan : Tidak ada dasar berupa SK untuk pencairan Honorarium pembuatan ANJAB

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian

- Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian : Hambatan kegiatan monitoring alat (excavator) dilokasi jauh dari kecamatan. Alat besar berada di hutan, kadang - kadang tidak terjangkau lagi sampai ke titik lokasi alat tersebut; Kegiatan hibah yang ada berdasarkan permohonan proposal di dalam RKA yang di ajukan tidak cocok di dalam RKA. baik alamat dan nama kelompok taninya, untuk itu perlu perbaikan dan menunggu dalam perubahan, baru dapat dilaksanakan; Untuk terdaptarnya

- permohonan/proposal dilakukan penginputan sistem simultan, pada saat ini sistem yang digunakan masih bermasalah. jadi kegiatan tersebut belum bisa terlaksana
- b. Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman : Masih dalam tahapan sosialisasi kepada petani penerima hibah daerah
- 3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B : Petani meminta bibit diganti dengan pupuk saja, jadi kegiatan fisik akan dilaksanakan di perubahan
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya : Sedang dalam tahap persiapan karena ada istilah yang salah dan harus menunggu perubahan
 - c. Kegiatan Pembangunan prasarana pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani : Lambatnya proses pekerjaan tanggul mekanik karena beberapa alat sedang maintenance sehingga untuk lokasi yang lain harus menunggu antian alat yang sedang diservis atau selesai nya pekerjaan ditempat lain
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani : Tidak adanya nama kelompok tani penerima hibah
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air : Tidak adanya nama kelompok tani penerima hibah
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya : Kegiatan belanja Hibah tergabung dalam satu rekening

- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : Honorarium tenaga pengamat hama penyakit belum bisa di cairkan dari bulan Maret s/d Juli karena SK dari Sekretariat Daerah belum keluar
 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan : Adanya beberapa lokasi Calon Penerima Hibah bantuan bibit berada pada zona HPK
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Kegiatan Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian : Lambatnya tindak lanjut dari perusahaan dalam menindak lanjuti Surat Perintah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi
- 6) Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian : Tidak adanya hambatan pada kegiatan ini, namun waktu pelaksanaan yang akan di tentukan
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota : Karena harga komoditi pertanian rendah sehingga ketika ingin mengadakan pertemuan atau kegiatan sekolah lapang, petani tidak mau untuk mengikuti kegiatan tersebut

Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 pada ***Tabel 2.1.***

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/ kegiatan / sub kegiatan Tahun lalu (2021)			Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	(9 = 7/8*100)	10	(11 = 6+8+10)	(12 = 11/5*100)
3.27.01	1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	132,48		66, 24	66, 24	100	100	66,24	131
3.27.01.2.01		1.1.		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	27		13	84	100	14	102	729
3.27.01.2.01.01			1.1.1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11		5	5	100	6	11	183
3.27.01.2.01.06			1.1.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8		4	4	100	4	8	200
3.27.01.2.01.07			1.1.3.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	8		4	4	100	4	8	200
3.27.01.2.02		1.2.		Administrasi keuangan perangkat daerah	ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Persen	200		100	100	100	100	100	100
3.27.01.2.02.01			1.2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	122		61	61	100	61	122	163

3.27.01.2.02.05		1.2.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5		1	1	100	4	5	500
3.27.01.2.03		1.3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	Persen	200		100	100	100	100	100	100
3.27.01.2.03.02		1.3.1.	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8		4	4	100	4	52	1,300
3.27.01.2.03.06		1.3.2.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10		5	5	100	5	10	200
3.27.01.2.05.		1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4		4	0	100	0	0	0
		1.4.1.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	4		4	0	0	0	0	0
3.27.01.2.06		1.5.	Administrasi umum perangkat daerah	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persen	200		100	100	100	100	100	100
3.27.01.2.06.01		1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		3	3	100	3	6	200
3.27.01.2.06.02		1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40		20	20	100	20	40	200
3.27.01.2.06.04		1.5.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		2	2	100	2	4	200
3.27.01.2.06.05		1.5.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	24		12	12	100	12	24	480
3.27.01.2.06.06		1.5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	35		14	14	100	21	35	269

					Disediakan									
3.27.01.2.06.09			1.5.6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	2	2	100	2	4	200	
3.27.01.2.07		1.6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1	0	0	0	0	-	
3.27.01.2.07.09			1.6.1.	Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	0	0	0	0	-	
3.27.01.2.08		1.7.		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Bulan	24	12	12	100	12	24	200	
3.27.01.2.08.01			1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2	2	100	3	5	167	
3.27.01.2.08.02			1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	8	4	4	100	4	8	200	
3.27.01.2.08.04			1.7.3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	50	23	23	100	27	50	185	
3.27.01.2.09		1.8.		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	Persen	200	100	100	100	100	200	200	
3.27.01.2.09.02			1.8.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	3	3	100	3	6	200	
3.27.01.2.09.06			1.8.2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	6	6	100	10	16	160	
3.27.01.2.09.09			1.8.3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1	1	100	1	2	100	
3.27.01.2.13		1.9.		Penataan organisasi	Tersedianya Anjab dan ABK Dinas Perkebunan	Dokumen	4	2	2	100	2	4	200	
3.27.01.2.13.01			1.9.1.	Pengelolaan kelembagaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	2	2	100	2	4	200	

			dan analisis jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
3.27.02	2.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	122,50		32,50	32,50		100		90	122,50	153
3.27.02.2.01		2.1.	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Meningkatnya mutu genetik dan produksi tanaman sela perkebunan	Persen	95,75		45,75	32		100		50	82	164
3.27.02.2.01.01			2.1.1. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	6		3	0		0		3	3	-
3.27.02.2.01.02			2.1.2. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	16		5	3		100		11	14	280
3.27.02.2.02		2.2.	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Cakupan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Persen	125,75		45,75	0		0		80	80	175
3.27.02.2.02.02			2.2.1. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	Dokumen	6		3	0		0		3	3	150
3.27.02.2.02.03			2.2.2. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	Dokumen	3		1	0		0		2	2	67
3.27.03	3.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	47,04		23,52	23,52		100		23,52	47,2	104
3.27.03.2.01		3.1.	Pengembangan prasarana pertanian	Tersedianya prasarana perkebunan bagi petani	Jenis	9		4	4		100		5	9	225
3.27.03.2.01.01			3.1.1. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LC2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Dokumen	6		2	0		0		4	4	400

			berkelanjutan/LCP2B	Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola									
3.27.03.2.01.03		3.1.2.	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	11	2	2	100	9	11	550	
3.27.03.2.01.04		3.1.3.	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	5	0	0	0	5	5	500	
3.27.03.2.02	3.2.		Pembangunan prasarana pertanian	Tersedianya prasarana perkebunan bagi petani	Jenis	3	0	4	100	3	7	175	
3.27.03.2.02.01		3.2.1.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	55	28	20	100	27	47	134	
3.27.03.2.02.03		3.2.2.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	22	22	22	100	0	22	110	
3.27.03.2.02.06		3.2.3.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	9	6	4	100	3	11	55	
3.27.03.2.02.09		3.2.4.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	8	5	0	0	3	3	38	
3.27.05	4.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah dampak perubahan iklim yang ditangani	Kecamatan	40	20	20	100	20	40	200	
3.27.05.2.01	4.1.		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	84	42	42	100	42	84	200	
3.27.05.2.01.01		4.1.1.	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	1050	350	350	100	700	1050	525	
3.27.05.2.01.02		4.1.2.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Hektar	700	0	0	0	700	700	350	

				Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani											
3.27.05.2.01.05			4.1.3.	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	12		3	1		100	9	10	71
3.27.06	5.			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir	Persen	175		75	70		100	100	170	654
3.27.06.2.01		5.1.		Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi	Perusahaan	33		7	5		100	26	31	443
3.27.06.2.01.03			5.1.1.	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	33		7	5		100	26	31	443
3.27.07	6.			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	155,95		55,95	55,95		100	100	155,95	240
3.27.07.2.01		6.1.		Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani	Persen	140		60	60		100	80	130	163
3.27.07.2.01.01			6.1.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	150		75	75		100	75	150	200
3.27.07.2.01.02			6.1.2.	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	4		1	0		0	3	3	100
3.27.07.2.01.03			6.1.3.	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	28		20	20		100	8	28	140
3.27.07.2.01.05			6.1.4.	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	10		5	0		0	5	5	83

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan membuat Pengukuran Kinerja Kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*).

Selain itu analisis capaian kinerja dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023. Masing-masing sasaran kemudian ditetapkan indikatornya dan kemudian dibandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah pad ***Tabel 2.2.***

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022*	2023**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)		(8)		
1	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian	Persen			100,27	97	130	107,18	120	97	130	107,18	120	
2	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton			632.789	634.789	636.789	638.789	640.789	634.789	636.789	638.789	640.789	
3	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	Ton/Hektar			1,117	1,129	1,141	1,153	1,165	1,129	1,141	1,153	1,165	
4	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Jenis			1	1	2	4	4	1	2	4	4	
5	Produktifitas Kelapa	Ton Kopra/Hektar			1.21	1.22	1.25	1.27	1.3	1.22	1.25	1.27	1.3	
6	Produktifitas Kelapa Sawit	Ton CPO/Hektar			2.54	2.52	2.8	2.9	3	2.52	2.8	2.9	3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Karakteristik pembangunan perkebunan yang merupakan program pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan simultan setiap tahunnya, sehingga pelaksanaan program kegiatan merupakan juga upaya mempertahankan keberhasilan yang telah diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya.

Rendahnya produktivitas rata-rata kelapa Indragiri Hilir tidak terlepas dari luasnya lahan yang tua dan rusak. Saat ini tidak kurang dari 1.035 hektar lahan yang telah rusak dan mati akibat terendam air laut sebagai akibat rusaknya tanggul-tanggul, prasarana dan sarana penunjang, serangan hama dan masih ada beberapa permasalahan sesuai fungsi pelayanan OPD.

1. Permasalahan di Bidang Prasarana dan Sarana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang prasarana dan sarana, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam melakukan perbaikan/pemeliharaan sarana, prasarana dan infrastruktur kebun, sementara laju kerusakan kebun justru semakin besar per tahunnya.
- b. Terdegradasinya kemampuan lingkungan di dalam menahan laju infiltrasi (intrusi) air laut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin bertambah. Di sisi lain, kemampuan untuk melakukan kegiatan penanggulangan kebun yang rusak dan kritis oleh Dinas Perkebunan, dibatasi oleh ketersediaan dana dan sumber daya yang ada masih rendah.
- c. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana terutama alat Berat Exavator dan Operasional alat berat.
- d. Identifikasi yang valid secara kuantitatif maupun kualitatif data luasan dan peta kebun dengan kondisi yang rusak dan kritis masih belum tersedia.

- e. Serapan terhadap program pupuk bersubsidi dari pemerintah yang dialokasikan kepada kelompok tani masih sangat rendah.
 - f. Tidak tersedianya akses prasarana dan sarana penunjang, seperti jalan produksi pada lahan perkebunan untuk mendukung akses distribusi hasil perkebunan masih rendah menyebabkan biaya angkut sarana produksi dan hasil panen menjadi tinggi karena mahalnya biaya transportasi air yang pada kondisi tertentu transportasi air juga tergantung waktu pasang surut sehingga transportasi air menjadi tidak efisien.
 - g. Semakin tingginya air pasang setiap tahun dan abrasi laut yang semakin meningkat sudah tidak bisa diatasi dengan trio tata air yang ada yang sebagian besar trio tata air tersebut sudah rusak.
2. Permasalahan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, sebagai berikut:
- a. Produktivitas Kelapa masih rendah dan ketersediaan sarana produksi perkebunan.
 - b. Kurangnya pengetahuan petani dalam mengembangkan bibit unggul.
 - c. Keterbatasan Tim Peneliti sehingga Masih kurangnya Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT)
 - d. Masih terjadi serangan organisme pengganggu tanaman yang sifatnya insidental, tetapi tingkat serangan termasuk masif (berat) yang merugikan secara ekonomis.
 - e. Masih rendahnya partisipasi pemilik kebun dalam melakukan pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara swadaya. Pemilik kebun lebih mengharapkan bantuan pemerintah.
 - f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan masih terbatasnya tenaga Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) jika dibandingkan dengan jumlah dan luas wilayah pengamatan serta masih terbatasnya

kemampuan dan keterampilan aparat dan petani dalam pengendalian hama secara terpadu.

- g. Belum sepenuhnya program pengembangan tanaman perkebunan bisa mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara, program ini dinilai sangat perlu. Sebagai contoh, program pengembangan tanaman kakao dan kopi sebagai tanaman sela di antara tanaman perkebunan utama.
- h. Masih rendahnya pengembangan komoditas tanaman perkebunan untuk beberapa komoditas, seperti tanaman kelapa, karet dan sagu. Faktor yang mempengaruhinya lebih disebabkan karena banyaknya kepentingan untuk melakukan alih fungsi ke komoditas lain yang secara ekonomi dinilai lebih menguntungkan.
- i. Belum maksimalnya pemanfaatan benih/bibit kelapa sawit yang berasal dari sumber yang resmi, dimana di lapangan masih sering ditemukan beredarnya benih/bibit yang tidak jelas asal usulnya (bibit palsu). Sebagai upaya untuk meminimalisir hal tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memfasilitasinya dengan memberikan bantuan benih berupa kecambahkelapa sawit dan bibit kelapa sawit siap tanam kepada petani. Selain itu, juga diberikan fasilitasi kepada petani/kelompok tani yang berkeinginan membeli benih/bibit yang resmi.

3. Permasalahan Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pengolahan dan pemasaran, sebagaiberikut :

- a. Masih kurangnya optimalisasi alat dan mesin pengolahan hasil dan penanganan pasca panen perkebunan oleh kelompok tani/kelompok usaha. Di sisi lain, pengawasan dan pembinaan terhadap operasionalisasi alat dan mesin pengolahan hasil dan penanganan pasca panen perkebunan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal.
- b. *Data base* perusahaan pengolahan hasil dan penanganan pasca panen skala menengah dan kecil masih belum valid dan terkini,

sehingga tidak ada informasi yang detail dan komprehensif terkait dengan hal tersebut.

- c. Akses pasar dan pemasaran produk hasil perkebunan petani di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbatas, sementara produk hasil perkebunan berikut dengan ikutannya sangat melimpah.
- d. Pengetahuan dan pemahaman petani mengenai penerapan standardisasi mutu masih rendah. Akibat dari itu, nilai penerimaan pasar dan daya saing terhadap produk hasil perkebunan petani di Kabupaten Indragiri Hilir juga masih rendah.
- e. Fluktuasi harga dan penentuan harga ditentukan sepihak dan produk perkebunan yang dihasilkan masih berupa bahan baku dan produk hasil olahan belum optimal.

4. Permasalahan Bidang Penyuluh

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang penyuluh, sebagai berikut :

- a. Penyebarluasan informasi teknologi usahatani perkebunan tidak merata karena tenaga penyuluh sangat kurang.
- b. Minimnya sarana informasi.
- c. Pemutakhiran teknologi dari sektor hulu maupun hilir masih lambat. Oleh karenanya, proses transfer teknologi masih perlu terus digalakkan kepada petani.
- d. Pemutakhiran teknologi dari sektor hulu maupun hilir masih lambat. Oleh karenanya, proses transfer teknologi masih perlu terus digalakkan kepada petani.

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir maka dalam upaya pengembangan fungsi layanan ini Dimana secara sistematis, hasil kajian/telaah atas peluang dan tantangan dalam 5 Tahun kedepan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Dinas Perkebunan dituangkan sebagai berikut :

- 1) Tantangan (*Threats*) adalah unsur pada lingkungan eksternal yang tantangan bagi pencapaian tujuan :
 - a. Penerapan Teknologi yang terbatas dikarenakan sebagian besar lahan gambut
 - b. Daya saing produksi masih rendah
 - c. Produktivitas Tanaman perkebunan yang masih rendah
 - d. Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana produksi
 - e. Isu lingkungan hidup dan globalisasi
 - f. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani
 - g. Fluktuasi harga komoditi
 - h. Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah
 - i. Semakin tingginya alih fungsi lahan;
- 2) Peluang (*Opportunities*) yaitu situasi dan faktor faktor luar yang bersifat positif dan menjadi daya dorong Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yakni :
 - a. Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia),
 - b. SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan perkebunan;
 - c. Posisi wilayah Riau yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah
 - d. pemasaran baik nasional dan internasional;
 - e. Pengembangan perkebunan terbuka luas;
 - f. Kebijakan pemerintah yang sangat mendukung;
 - g. Banyaknya sektor swasta tumbuh dan berkembang;
 - h. Infrastruktur;
 - i. Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan;
 - j. Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir;
 - k. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
 - l. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;

- m. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah;
- n. Optimalisasi Lahan.

2. Rekomendasi dan catatan strategis langkah tindak lanjut pada isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program- program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Strategi

Strategi Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk Perkebunan.
- b. Peningkatan Infrastruktur Pertanian / Perkebunan.
- c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Teknis Perkebunan.
- d. Memperkuat Kelembagaan Pertanian.
- e. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
- f. Memastikan Kecukupan dan Kontinuitas Ketersediaan Sarana Produksi.

- g. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral.
 - h. Pengembangan Bibit Unggul Daerah.
 - i. Pengendalian, Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Perubahan Iklim.
 - j. Mewujudkan Efisiensi Produksi Pertanian/Perkebunan.
2. Kebijakan
- a. Kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana
 - Melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur lahan dan air yang terencana untuk menunjang budidaya perkebunan dengan tingkat produktifitas optimal dan berkelanjutan.
 - Melakukan perluasan areal perkebunan melalui pengembangan komoditas aneka tanaman perkebunan maupun melalui pengembangan tanaman sela perkebunan.
 - Mengatur penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Produksi Perkebunan.
 - Inventarisasi Perkebunan Besar Swasta, Perizinan Usaha Perkebunan, pembiayaan usaha dan pengawalan kredit usaha perkebunan.
 - Prasarana dan Sarana lingkup Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Pembiayaan dan Investasi.
 - b. Kebijakan di Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan
 - Melakukan pengembangan benih unggul untuk keperluan perkebunan;
 - Melakukan pembinaan dan mengatur penyediaan bahan dan peralatan dalam rangka perlindungan tanaman perkebunan;
 - Melakukan peremajaan dan rehabilitasi kebun rakyat yang sudah tidak produktif;
 - Melakukan percepatan penerapan teknologi perkebunan kepada petani.
 - c. Kebijakan di Bidang Penyuluhan
 - Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimasi usaha perkebunan secara berkelanjutan.

- Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Kelembagaan lingkup Kelompok tani, Gapoktan, Asosiasi petani perkebunan dan koperasi, Kemitraan Perkebunan.
 - Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan lingkup Peningkatan SDM, penempatan Penyuluh sesuai dengan potensi daerah.
 - Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Ketenagaan lingkup Peningkatan SDM, penempatan Penyuluh sesuai dengan potensi daerah.
- d. Kebijakan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran
- Mengembangkan usaha pasca panen, pengolahan dan meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil perkebunan yang memiliki standar baku dan daya saing serta diterima pasar sekaligus dapat bermanfaat sebagai sumber energi alternatif yang potensial dan terbarukan ;
 - Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan perkebunan serta meningkatkan kemitraan antara pekebun dengan seluruh *stake holder* guna pengembangan sektor perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan ;
 - Mengembangkan akses pasar, informasi pasar dan pemasaran hasil perkebunan serta meningkatkan promosi hasil dan produk olahan perkebunan.
 - Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Bimbingan Usaha lingkup Bimbingan dan penerapan standarisasi dan mutu produk hasil perkebunan prinsip-prinsip penanganan pasca panen dan prinsip pengolahan hasil perkebunan yang baik serta Pengembangan Usaha.

2.4 Review terhadap Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 Tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam RKPD.

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan maka pada Tahun 2023 dengan 6 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang direncanakan. Pada Tahun 2023 telah direncanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.33,243,587,125,-. Dana tersebut kesemuanya berasal dari APBD II Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan DAK FISIK Bid. Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasaranan Fisik Dasar Pembangunan Pertanian.

Besarnya dana usulan yang tidak terakomodasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran hal ini disebabkan oleh ketersediaan dana relative kecil sedangkan kebutuhan masyarakat besar, lebih jelasnya dapat dilihat pada ***Tabel 2.3.***

Tabel 2.3.
Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting		
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN						55,410,133,779	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN						33,243,587,125	Terjadi Pergeseran Anggaran			
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	76.16	10,938,364,493	1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	76.16	10,841,836,152	Terjadi Pergeseran Anggaran
	1.1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	15	457,173,514		1.1.		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	14	393,978,514	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.1.1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	322,129,514		1.1.1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	286,413,514	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.1.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	29,114,000		1.1.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	4	28,160,000	Terjadi Pergeseran Anggaran

		1.1.3.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	105,930,000			1.1.3.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kinerja SKPD Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	79,405,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
	1.2.		Administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Cakupan ketersediaan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	7,353,383,779			1.2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan ketersediaan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	7,198,541,779	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75	7,346,933,779			1.2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75	7,198,541,779	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.2.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	6,450,000			1.2.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4,950,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
	1.3.		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Cakupan ketersediaan Administrasi dan sarana prasarana perangkat daerah	Persen	100	888,971,400			1.3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan ketersediaan Administrasi dan sarana prasarana perangkat daerah	Persen	100	713,798,400	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.3.1.	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	57,974,400			1.3.1.	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	57,974,400	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.3.2.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	830,997,000			1.3.2.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	655,824,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
	1.4.		Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Cakupan ketersediaan Administrasi dan sarana prasarana perangkat daerah	Persen	100	1,197,153,650			1.4.	Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan ketersediaan Administrasi dan sarana prasarana perangkat daerah	Persen	100	1,273,654,759	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	6	50,050,000			1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Paket	3	25,628,000	Terjadi Pergeseran Anggaran

			an Bangunan Kantor	Semua Kelurahan	yang Disediakan						an Bangunan Kantor	Semua Kelurahan	an Bangunan Kantor yang Disediakan						
		1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22	300,599,900			1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	240,127,900		Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	105,909,500			1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	125,754,609		Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	6	22,237,250			1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5	17,237,250		Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	7	25,000,000			1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	13	125,000,000		Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.4.6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	693,357,000			1.4.6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	739,907,000		Terjadi Pergeseran Anggaran
	1.5.		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Bulan	12	618,511,200			1.5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Bulan	12	698,011,200		Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2,500,000			1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	2,000,000		Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	142,500,000			1.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	222,500,000		Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.5.3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	27	473,511,200			1.5.3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	27	473,511,200		Terjadi Pergeseran Anggaran
	1.6.		Pemeliharaan	Semua	Aset dan Barang	Persen	100	412,470,950			1.6.	Pemeliharaan	Semua	Aset dan Barang	Persen	100			Terjadi

			barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara						barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara			396,904,000	Pergeseran Anggaran	
		1.6.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	115,000,000			1.6.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	124,604,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.6.2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	47,500,000			1.6.2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	38,000,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		1.6.3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	249,970,950			1.6.3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	234,300,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
	1.7.		Penataan organisasi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penataan organisasi	Dokumen	2	10,700,000.00			1.7.	Penataan organisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penataan organisasi	Dokumen	2	10,700,000	
		1.7.1	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	10,700,000.00			1.7.1	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	10,700,000	
2.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	100	16,601,529,400	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	45.75	5,877,080,400	Terjadi Pergeseran Anggaran
	2.1.		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persen	80	16,004,871,400		2.1.		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persen	45.75	5,455,428,400	Terjadi Pergeseran Anggaran
		2.1.1.	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,	Laporan	2	176,000,000			2.1.1.	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Pengawasan Penggunaan sarana pendukung	Laporan	2	132,117,000	Terjadi Pergeseran Anggaran

			dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Kelurahan	teknologi dan spesifik lokasi						dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Kelurahan	pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi					
		2.1.2.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	50	15,828,871,400			2.1.2.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	11	5,323,311,400	Terjadi Pergeseran Anggaran
	2.2.		Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Persen	45.75	596,658,000			2.2.	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Persen	45.75	421,652,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		2.2.1.	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	Dokumen	3	200,658,000			2.2.1.	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	Dokumen	2	113,562,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		2.2.2.	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	Dokumen	3	396,000,000			2.2.2.	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	Dokumen	3	308,090,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
3.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	80	22,776,515,886	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	45.22	11,989,486,573	Terjadi Pergeseran Anggaran
	3.1.		Pengembangan prasarana pertanian	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan prasarana pertanian	Jenis	4	373,600,000			3.1.	Pengembangan prasarana pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan prasarana pertanian	Jenis	4	330,872,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		3.1.1.	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LC 2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/K P2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LC P2B	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang Dikelola	Dokumen	1	79,100,000			3.1.1.	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LC 2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/K P2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LC P2B	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang Dikelola	Dokumen	1	79,100,000	

		3.1.2.	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	194,500,000			3.1.2.	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	151,772,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		3.1.3.	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	1	100,000,000			3.1.3.	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	1	100,000,000	
	3.2.		Pembangunan prasarana pertanian	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	8	22,402,915,886			3.2.	Pembangunan prasarana pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	4	11,658,614,573	Terjadi Pergeseran Anggaran
		3.2.1.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	45	13,627,181,086			3.2.1.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	35	8,378,579,773	Terjadi Pergeseran Anggaran
		3.2.2.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30	4,180,636,900			3.2.2.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20	1,631,876,900	Terjadi Pergeseran Anggaran
		3.2.3.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30	3,329,328,400			3.2.3.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20	1,042,128,400	Terjadi Pergeseran Anggaran
		3.2.4.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	1,265,769,500			3.2.4.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	8	606,029,500	Terjadi Pergeseran Anggaran
4.			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penurunan Serangan OPT	Kecamatan	25	2,523,724,000	4			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penurunan Serangan OPT	Kecamatan	20	1,851,612,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
	4.1.		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Persen	45	2,523,724,000			4.1.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Persen	42	1,851,612,000	Terjadi Pergeseran Anggaran

		4.1.1.	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	210	200,000,000		4.1.1.	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	200	154,090,000	Terjadi Pergeseran Anggaran	
		4.1.2.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	Hektar	50	189,124,000		4.1.2.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	Hektar	50	116,372,000	Terjadi Pergeseran Anggaran	
		4.1.3.	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	20	2,134,600,000		4.1.3.	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	14	1,581,150,000	Terjadi Pergeseran Anggaran	
5.			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi	Perusahaan	26	500,000,000.00	5		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi	Perusahaan	26	500,000,000		
	5.1.		Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Cakupan Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Persen	90	500,000,000.00		5.1.		Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Persen	90	500,000,000	
		5.1.1.	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	7	500,000,000.00		5.1.1.	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	7	500,000,000		
6.			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	80	2,070,000,000	6		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	80	2,183,572,000	Terjadi Pergeseran Anggaran	
	6.1.		Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	Persen	65	2,070,000,000		6.1.		Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	Persen	65	2,183,572,000	Terjadi Pergeseran Anggaran

		6.1.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	8	1,600,000,000			6.1.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	8	1,539,250,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		6.1.2.	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	120,000,000			6.1.2.	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3	365,650,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		6.1.3.	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	22	250,000,000			6.1.3.	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	20	198,720,000	Terjadi Pergeseran Anggaran
		6.1.4.	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	7	100,000,000			6.1.4.	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	6	79,952,000	Terjadi Pergeseran Anggaran

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Besarnya dana usulan yang tidak terakomodasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran hal ini disebabkan oleh ketersediaan dana relative kecil sedangkan kebutuhan masyarakat besar, lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	90%	
1	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologidan Spesifik Lokasi	Inhil	- Jumlah Varietas bibit unggul lokal, Blok Penghasil tinggi dan pohon induk yang di tetapkan	3 Komoditas	
2	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Inhil	- Jumlah sarana dan prasarana perkebunan/pertanian yang disediakan	11 Jenis	
3	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Inhil	- Jumlah bibit ungl yang disediakan	3 Komoditas	
4	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Inhil	- Jumlah bibit tanaman sela pada tanaman kelapa yang disediakan	8000 Batang	
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	90%	
1	- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Inhil	- Luas Lahan pangan perkebunan yang diremajakan	4 Ha	
2	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Inhil	- Persentase Pelayanan informasi pasar, potensi, harga komoditas, sentra produksi, fasilitasi dan pembukaan akses pasar produk perkebunan	90 %	
3	- Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Inhil	- Jumlah Masterplan kawasan dan komoditas perkebunan yang di susun	5 Dokumen	
4	- Pembangunan, Rehabilitasi dan	Inhil	- Panjang tanggul mekanik yang dibangun	152,4 KM	

	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				
5	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Inhil	- Jumlah jalan produksi yang dibangun	4	Lokasi
6	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Inhil	- Jumlah pintu air yang dibangun	3	Unit
7	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Inhil	- Jumlah prasarana pertanian yang disediakan	3	Unit
III	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Serangan OPT	85%	
1	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Inhil	- Luas pengendalian OPT yang ditangani	700	Ha
2	- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Inhil	- Jumlah dampak perubahan iklim yang ditangani	20	Kecamatan
3	- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inhil	- Luas kebun kelapa yang diremajakan	30	Ha
IV	Program Perizinan Usaha Pertanian		Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	
1	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Inhil	- Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin perusahaannya	26	Perusahaan
V	Program Penyuluhan Pertanian		Cakupan Bina Kelompok Petani	100 %	
1	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Inhil	- Jumlah penyuluh perkebunan yang dibayarkan dan ditingkatkan kapasitasnya	75	Orang
2	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Inhil	- Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya	3	Kelompok
3	- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Inhil	- Jumlah BPP yang dihadiri pertemuan Bulanannya	8	BPP
4	- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Inhil	- Jumlah Pelatihan petani yang dilaksanakan	1	Kali

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program Nasional pada urusan pilihan Dinas Perkebunan yaitu mengacu pada sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian RI yaitu (1) Peningkatan Kemampuan Pelaku Utama (2) Peningkatan diversifikasi hasil perkebunan melalui program *food estate* (3) Peningkatan Luas Lahan Perkebunan Rakyat (4) Penyediaan Bahan Baku Bio Industri dan Bioenergi (5) Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani. Sedangkan Program Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tertera pada Tabel berikut.

Tabel 3.1

Keselarasan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten dengan APBN

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Peningkatan kemampuan pelaku utama	1. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai yang diharapkan	1. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar	1. Pesatnya perkembangan teknologi pertanian, dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
2.	Peningkatan diversifikasi hasil perkebunan melalui program <i>food estate</i>	2. Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas	2. Sumber daya manusia dan kelembagaan belum tangguh dan mandiri	2. Kewenangan Dinas dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
3.	Peningkatan luas lahan perkebunan rakyat	3. Lahan yang diusulkan Dinas Perkebunan banyak yang termasuk kedalam kawasan hutan	3. Terbantur tentang aturan peta Kawasan lingkungan hutan	3. Komitmen pimpinan serta jajarannya

		lindung		dalam menyelesaikan tentang peta kawasan
4.	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;	4. Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas	4. Belum optimalnya kinerja petugas lapangan	4. Kewenangan Dinas dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
5.	Peningkatan pendapatan keluarga petani;		5. Pola agribisnis yang masih tradisional	5. Adanya PPL Perkebunan dan THL TBPP

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target	
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian	Persen	100,27	97	130	107,18	120
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	632.789	634.789	636.789	638.789	640.789
			Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	Ton/Hektar	1,117	1,129	1,141	1,153	1,165
		Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Jenis	1	1	2	4	4

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun. Didalam proses Rencana Kerja, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA).

3.3.1 Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018-2023 yaitu **“Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah, dan Bermartabat”**. Serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018-2023 pada Point ke 3 (Tiga) Yaitu **“Melanjutkan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat”**. Dengan Sasaran Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah ; 1) Meningkatnya Produktifitas sektor pertanian, 2) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan, 3) Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan.
- b. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

- d. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

3.3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2023 melaksanakan 6 (Enam) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN		33,243,587,125.00	PENDAPATAN TRANSFER
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,841,836,152.00	PENDAPATAN TRANSFER
I.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	393,978,514.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	286,413,514.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar	Semua Kabupaten/Kota, Semua	28,160,000.00	PENDAPATAN TRANSFER

	realisasi kinerja SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan		
3.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,405,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
II.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,198,541,779.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,198,541,779.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,950,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
III.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	713,798,400.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,974,400.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	655,824,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
IV.	Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,273,654,759.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,628,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,127,900.00	PENDAPATAN TRANSFER
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,754,609.00	PENDAPATAN TRANSFER
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	17,237,250.00	PENDAPATAN TRANSFER

		Semua Kelurahan		
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	739,907,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
V.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	698,011,200.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222,500,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	473,511,200.00	PENDAPATAN TRANSFER
VI.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,904,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,604,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,300,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
VII.	Penataan organisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,700,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,700,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
B.	PROGRAM PENYEDIAAN	Semua	5,877,080,400.00	PENDAPATAN

	DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		TRANSFER
I.	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,455,428,400.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,117,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,323,311,400.00	PENDAPATAN TRANSFER
II.	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	421,652,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,562,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308,090,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
C.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,989,486,573.00	PENDAPATAN TRANSFER
I.	Pengembangan prasarana pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330,872,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LC2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,100,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,772,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
3.	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan	Semua Kabupaten/Kota, Semua	100,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER

	komoditas perkebunan	Kecamatan, Semua Kelurahan		
II.	Pembangunan prasarana pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,658,614,573.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,378,579,773.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,631,876,900.00	DAK FISIK Bid. Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasaranan Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
3.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,042,128,400.00	DAK FISIK Bid. Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasaranan Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
4.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	606,029,500.00	PENDAPATAN TRANSFER
D.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,851,612,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
I.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,851,612,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,090,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,372,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
3.	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,581,150,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
E.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	500,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER

		Semua Kelurahan		
I.	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
F.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,183,572,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
I.	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,183,572,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,539,250,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
2.	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	365,650,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
3.	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,720,000.00	PENDAPATAN TRANSFER
4.	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,952,000.00	PENDAPATAN TRANSFER

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses Perubahan rencana kerja, Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2023 pada PD Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan pencapaian strategis pembangunan yang terdapat dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, yang terdiri dari;

1. Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal Perkebunan.
2. Penguatan daya saing produk pertanian.

Dalam mencapai strategis pembangunan pada rencana kerja Dinas Perkebunan, maka aspek program utama rencana kerja tahun 2023 antara lain :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun rincian rencana kegiatan per program rencana kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada ***Tabel 4.1.***

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.27.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN								33,243,587,125.00	PENDAPATAN TRANSFER			
3.27.01	1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.16	10,841,836,152.00	PENDAPATAN TRANSFER		80	10,869,339,629.00
3.27.01.2.01		1.1.		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14	393,978,514.00	PENDAPATAN TRANSFER		20	635,044,000.00
3.27.01.2.01.01			1.1.1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	286,413,514.00	PENDAPATAN TRANSFER		10	500,000,000.00
3.27.01.2.01.06			1.1.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	28,160,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		5	29,114,000.00
3.27.01.2.01.07			1.1.3.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	79,405,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		5	105,930,000.00
3.27.01.2.02		1.2.		Administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan ketersediaan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	7,198,541,779.00	PENDAPATAN TRANSFER		100	7,353,933,779.00
3.27.01.2.02.01			1.2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/bulan	Semua Kabupaten/Kota,	75	7,198,541,779.00	PENDAPATAN TRANSFER		75	7,346,933,779.00

					Tunjangan ASN		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3.27.01.2.02.05			1.2.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	4,950,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2	7,000,000.00
3.27.01.2.03		1.3.		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Cakupan ketersediaan Administrasi dan sarana prasarana perangkat daerah	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	713,798,400.00	PENDAPATAN TRANSFER		100	890,997,000.00
3.27.01.2.03.02			1.3.1.	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	57,974,400.00	PENDAPATAN TRANSFER		5	60,000,000.00
3.27.01.2.03.06			1.3.2.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	655,824,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		7	830,997,000.00
3.27.01.2.06		1.4.		Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan ketersediaan Administrasi dan sarana prasarana perangkat daerah	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1,273,654,759.00	PENDAPATAN TRANSFER		100	1,197,153,650.00
3.27.01.2.06.01			1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	25,628,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		5	50,050,000.00
3.27.01.2.06.02			1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	240,127,900.00	PENDAPATAN TRANSFER		25	300,599,900.00
3.27.01.2.06.04			1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	125,754,609.00	PENDAPATAN TRANSFER		2	105,909,500.00
3.27.01.2.06.05			1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	17,237,250.00	PENDAPATAN TRANSFER		6	22,237,250.00
3.27.01.2.06.06			1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13	125,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER	TIDAK LAGI BEKERJA SAMA DENGAN BEBERAPA MEDIA	9	25,000,000.00

3.27.01.2.06.09		1.4.6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200	739,907,000.00	PENDAPATAN TRANSFER	ONLINE	200	693,357,000.00
3.27.01.2.08		1.5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	698,011,200.00	PENDAPATAN TRANSFER		10	619,011,200.00
3.27.01.2.08.01		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	2,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		4	3,000,000.00
3.27.01.2.08.02		1.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	222,500,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2	142,500,000.00
3.27.01.2.08.04		1.5.3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27	473,511,200.00	PENDAPATAN TRANSFER		27	473,511,200.00
3.27.01.2.09		1.6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	396,904,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		100	162,500,000.00
3.27.01.2.09.02		1.6.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	124,604,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		3	115,000,000.00
3.27.01.2.09.06		1.6.2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	38,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		10	47,500,000.00
3.27.01.2.09.09		1.6.3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	234,300,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2	249,970,000.00
3.27.01.2.13		1.7.	Penataan organisasi	Cakupan Penataan organisasi	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	10,700,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2	10,700,000.00
3.27.01.2.13.01		1.7.1	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua	2	10,700,000.00	APBD		2	10,700,000.00

				Analisis Jabatan		Kecamatan, Semua Kelurahan							
3.27.02	2.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	5,877,080,400.00	APBD		100	16,505,529,400.00
3.27.02.2.01		2.1.		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Cakupan Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.75	5,455,428,400.00	PENDAPATAN TRANSFER		80	16,004,871,400.00
3.27.02.2.01.01			2.1.1.	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	132,117,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		3	176,000,000.00
3.27.02.2.01.02			2.1.2.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11	5,323,311,400.00	PENDAPATAN TRANSFER		20	15,828,871,400.00
3.27.02.2.02		2.2.		Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Cakupan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.75	421,652,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		50	500,658,000.00
3.27.02.2.02.02			2.2.1.	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	113,562,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		3	200,658,000.00
3.27.02.2.02.03			2.2.2.	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	308,090,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		3	300,000,000.00
3.27.03	3.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.22	11,989,486,573.00	PENDAPATAN TRANSFER		60	22,776,515,886.00
3.27.03.2.01		3.1.		Pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Pengembangan prasarana pertanian	Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	330,872,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		5	373,600,000.00
3.27.03.2.01.01			3.1.1.	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LC2B,	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua	1	79,100,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1	79,100,000.00

				kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		Kecamatan, Semua Kelurahan						
3.27.03.2.01.03			3.1.2.	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	151,772,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2	194,500,000.00
3.27.03.2.01.04			3.1.3.	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	100,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1	100,000,000.00
3.27.03.2.02		3.2.		Pembangunan prasarana pertanian	Cakupan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	11,658,614,573.00	PENDAPATAN TRANSFER		8	22,402,915,886.00
3.27.03.2.02.01			3.2.1.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35	8,378,579,773.00	PENDAPATAN TRANSFER		40	13,627,181,086.00
3.27.03.2.02.03			3.2.2.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	1,631,876,900.00	DAK FISIK Bid. Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		25	4,180,636,900.00
3.27.03.2.02.06			3.2.3.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	1,042,128,400.00	DAK FISIK Bid. Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		40	3,329,328,400.00
3.27.03.2.02.09			3.2.4.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	606,029,500.00	PENDAPATAN TRANSFER		10	1,265,769,500.00
3.27.05	4.			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	1,851,612,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		20	2,834,600,000.00
3.27.05.2.01		4.1.		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Cakupan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42	1,851,612,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		80	2,484,600,000.00

3.27.05.2.01.01			4.1.1.	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200	154,090,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		200	200,000,000.00
3.27.05.2.01.02			4.1.2.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	Hektar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	116,372,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		50	150,000,000.00
3.27.05.2.01.05			4.1.3.	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14	1,581,150,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		15	2,134,600,000.00
3.27.06	5.			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi	Perusahaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26	500,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		10	150,000,000.00
3.27.06.2.01		5.1.		Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90	500,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER	ADA PERGESERAN ANGGARAN	80	150,000,000.00
3.27.06.2.01.03			5.1.1.	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7	500,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER	ADA PERGESERAN ANGGARAN	3	150,000,000.00
3.27.07	6.			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	2,183,572,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		80	2,650,000,000.00
3.27.07.2.01		6.1.		Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Cakupan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	Persen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65	2,183,572,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		65	2,650,000,000.00
3.27.07.2.01.01			6.1.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	1,539,250,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		10	2,000,000,000.00

3.27.07.2.01.02.		6.1.2.	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	365,650,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		5	150,000,000.00
3.27.07.2.01.03		6.1.3.	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	198,720,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		20	300,000,000.00
3.27.07.2.01.05		6.1.4.	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	79,952,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		10	200,000,000.00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 menjadi sangat penting untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Tembilahan, Agustus 2022

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. SIRAJUDDIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660609 198603 1 003